

---

## KOMUNIKASI PERANGKAT NAGARI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Dewi Listyawati<sup>1</sup>, Sarmiati<sup>2</sup> & Asmawi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas

Email: listyawati.dewi@yahoo.com

### *Abstract*

*There is distrust and suspicion between the community and the nagari government in managing village funds. The nagari tool argues that the community does not care about managing village funds if the funds do not directly touch the community. While the community does not understand the village fund program and has very little curiosity about the distribution of village funds. According to residents, village funds are only for nagari devices and for the people around them and the development that has been done is considered not to come from village funds. Communication solutions to these problems include providing more understanding to the community of the Nagari government. They should more often disseminate information about village funds and programs that will be implemented to the village community. Those who work as nagari devices should be people with adequate education and ability to deal with problems related to village funds, for example the ability to prepare village fund reports or provide good services and information to the community. The community should care about the village fund program and the development program that will be implemented, participate in the village meetings held.*

**Keywords:** *Communication, Village Funds, Nagari Government.*

### **A. PENDAHULUAN**

Komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri merupakan saran/masukan kepada pemerintah untuk melaksanakan prioritas pembangunan dengan kebutuhan yang mendesak. Dengan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang membahas mengenai program dana desa, proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Begitu juga halnya dengan komunikasi yang dilakukan oleh perangkat nagari dalam pengelolaan dana desa. Komunikasi perangkat nagari sebagai komunikator dalam suatu pemerintahan kepada masyarakatnya sebagai komunikan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan.

Pengelolaan dana desa yang tidak tepat dapat membawa perangkat desa masuk jeruji besi. Pemerintah mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dalam penyaluran dana desa, dan masyarakat dihimbau untuk ikut mengawasi proses penyaluran dana desa, bahwa pengawasan yang baik adalah dari masyarakat.

Nagari Ampang Pulaui adalah salah satu nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 5.000 jiwa, memiliki kawasan wisata Pantai Batu Kalang sebagai penyangga Kawasan Wisata Mandeh. Dengan jumlah penduduk dan banyaknya wisatawan yang mengunjungi wilayah sekitar Ampang Pulaui, menjadikan nagari tersebut menjadi daerah yang terbuka akan informasi. Namun keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa belum maksimal.

Adanya ketidakpercayaan dan kecurigaan antara masyarakat dengan pemerintah nagari dalam pengelolaan dana desa. Perangkat nagari berpendapat bahwa masyarakat tidak peduli dengan pengelolaan dana desa apabila dana tersebut tidak menyentuh masyarakat secara langsung. Sedangkan masyarakat kurang memahami program dana desa dan memiliki keingintahuan yang sangat sedikit tentang penyaluran dana desa tersebut. Warga berpendapat bahwa dana desa hanya diperuntukkan bagi perangkat nagari dan orang-orang disekitarnya saja dan pembangunan yang telah dilakukan dianggap bukan berasal dari dana desa.

Stakeholder Utama dalam tulisan ini adalah Wali dan Perangkat Nagari, Masyarakat dan Kepala Kampung. Stakeholder Pendukung yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan KB, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Komunikasi

Komunikasi sebagai kegiatan pertukaran informasi untuk memperoleh pemahaman bersama antara manusia dengan manusia lainnya atau hubungan antarmanusia. Menurut DeVito (1986) dalam Liliweri (2015: 53), komunikasi merupakan proses atau tindakan mengalihkan pesan dari pengirim kepada penerima melalui saluran tertentu setelah melalui gangguan interferensi.

Komunikasi manusia bertujuan untuk melayani lima tujuan umum, yaitu: (1) mengirimkan informasi (*to inform*). (2) menyatakan perasaan (*to express feelings*), menghibur (*to entertainment*), (4) mendidik (*to educated*), (5) memengaruhi (*to influence*), dan (6) mempertemukan harapan-harapan social (*to meet social expectations*) (Liliweri, 2015: 77).

Proses komunikasi adalah proses peleburan makna dari lambang-lambang komunikasi yang disampaikan komunikator dan komunikan. Osgood (1998) dalam Suryanto (2015: 203) meninjau proses komunikasi dari peranan manusia dalam hal memberikan interpretasi (penafsiran) terhadap lambang-lambang tertentu (*message*). Dalam proses komunikasi terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif. Liliweri (2015, 160-199) menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam proses komunikasi yaitu : Komunikator, Pesan, Media/Channel (Saluran), Komunikan, Efek ( Hasil), Umpan Balik (*Feedback*).

### 2. Komunikasi Antarpribadi/Interpersonal

Komunikasi antar pribadi sebagai proses yang merupakan rangkaian sistematis perilaku yang bertujuan yang terjadi dari waktu ke waktu atau berulang kali. Komunikasi antar pribadi bergantung kepada makna yang diciptakan oleh pihak yang terlibat. Melalui komunikasi kita menciptakan dan mengelola hubungan kita.

Menurut Liliweri (2014:458), komunikasi antarpribadi yang efektif dimulai dengan memberikan perhatian penuh “*thoughtfulness*” kepada orang

lain, tidak hanya mendengarkan apa yang orang lain katakan tetapi mencoba memahami apa yang dikatakan orang lain dari sudut pandang mereka. Agar komunikasi itu efektif maka komunikasi melibatkan pembicara dan pendengar, melibatkan penulis dan pembaca sehingga dapat menciptakan pemahaman bersama terhadap ide dan gagasan yang melibatkan dua pihak.

### **3. Hambatan dalam Proses Komunikasi**

Menurut Orbe dan Bruess (2015) dalam Suryanto (2015:67) hambatan (*noise*) dapat berbentuk fisik, psikologis, fisiologis, dan Semantik. Berikut beberapa jenis hambatan (*noise*):

- a. Fisik, meliputi kebisingan yang bersumber dari suara, seperti kebisingan lalu lintas, musik yang keras, badai atau angin, ombak, sensor atau gergaji mesin, mesin-mesin mobil di bengkel, hingga bau badan atau bau mulut.
- b. Jarak, tidak bebasnya berkomunikasi dengan seseorang karena dipisahkan dengan jarak
- c. Psikologis, meliputi semua jenis gangguan yang bersumber dari faktor-faktor fisiologis, seperti self-awareness, self-perception, persepsi, motivasi, hambatan mental yang mengganggu, kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan
- d. Sosiologis, misalnya hambatan status sosial, stratifikasi sosial, kedudukan atau peran berbeda antara pengirim dan penerima yang memengaruhi komunikasi
- e. Hambatan Antropologis, melalui hambatan kultural, seperti perbedaan latar belakang budaya, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain antara pengirim dan penerima yang memengaruhi komunikasi
- f. Hambatan Fisiologis, yaitu hambatan yang mencakup semua aspek fisik yang dapat mengganggu komunikasi
- g. Semantik, yaitu hambatan yang muncul dalam bentuk kata-kata yang dapat mengganggu perhatian pengirim dan penerima terhadap pesan (Orbe dan Bruess, 2005). Contoh, perbedaan bahasa atau konsep terhadap pesan antara pengirim dan penerima.

### **4. Teori Perencanaan Komunikasi**

Teori ini ditulis oleh Charles R Berger (2008), yang merupakan teori komunikasi yang terpusat pada individu. Teori Perencanaan Komunikasi

berusaha menjelaskan bagaimana individu-individu tiba pada sebuah pemahaman akan tindakan-tindakan dan pembicaraan terhadap satu sama lain dengan tujuan yang diarahkan, dan bagaimana individu-individu menghasilkan tindakan-tindakan dan pembicaraan yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sehari-hari (Budyatna, 2015:87).

Charles R Berger dalam Littlejohn & Foss (2011:185) menyatakan, teori perencanaan dikembangkan sebagai jawaban atas gagasan bahwa komunikasi merupakan proses mencapai tujuan. Manusia terlibat dalam kegiatan komunikasi hanya karena memang melakukannya; mereka berkomunikasi untuk memenuhi tujuan.

Menurut Berger (1995, 1997) dalam Budyatna (2015:91), perencanaan meliputi menilai situasi, memutuskan tujuan atau tujuan-tujuan apa untuk dikerjakan, menciptakan atau mendapatkan kembali rencana-rencana, dan kemudian melaksanakannya.

## **5. Jaringan Komunikasi**

Jaringan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai seperangkat aktor yang mempunyai relasi dengan aktor lain dalam tipe relasi tertentu (Eriyanto, 2014: 5). Ada dua bagian penting dari analisis jaringan, yakni aktor dan hubungan diantara aktor.

Aktor (*node*) tidak selalu berupa individu (orang). Aktor juga bisa organisasi, negara institusi, perusahaan, dan sebagainya. *Link* (*edge*) adalah relasi di antara aktor, *Link* dilambangkan dalam satu garis yang menghubungkan antara aktor yang satu dengan aktor yang lain. Adanya garis diantara aktor menunjukkan ada relasi, sebaliknya jika antara aktor tidak ada garis, bisa dibaca sebagai tidak ada relasi (Eriyanto, 2014: 5).

## **6. Desa dan Dana Desa**

Desa merupakan unit terkecil pemerintahan dalam lingkup tata pemerintahan di Indonesia. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No: 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, desa/ yang disebut nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakses dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Sumodiningrat danWulandari, 2016: 13).

Di Sumatera Barat, pemerintah yang paling rendah didaerah pedesaan adalah nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari yang melakukan kekuasaan eksekutif, dipilih melalui pemilihan umum oleh para penduduk nagari yang sudah dewasa. Untuk dapat menjalankan wewenang dan kewajibannya dengan sah, wali nagari terpilih memerlukan surat pengangkatan Gubernur. Wali Nagari didampingi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang melakukan kekuasaan legislatif, untuk memusyawarahkan masalah-masalah umum mengenai kepentingan nagari (Chairiyah, 2008: 68).

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri merupakan saran/masukan kepada pemerintah untuk melaksanakan prioritas pembangunan dengan kebutuhan yang mendesak. Dengan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang membahas mengenai program dana desa, proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Hal ini tergambar dari penelitian yang dilakukan oleh Ray Septianis Kartika (2012:183); Desti Nisa Isti,Oong Komar, et al (2017:60); Noerma Alifahrani Bahtiar (2017:11); Ricky Wirawan, Mardiyono, et al ( 2015: 307); Fathurrahman Fadil (2013: 257), yaitu partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan dana desa dimulai dari

tahap perencanaan pembangunan yang dimulai dengan musyawarah desa, tahap implementasi program dimana komunikasi masyarakat tetap dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sampai ke tahap evaluasi pembangunan desa menjadi faktor pendukung keberhasilan program pembangunan dengan memanfaatkan dana desa.

Komunikasi kepala desa dan perangkat desa kepada masyarakat dalam memberikan informasi terkait dana desa dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa menjadi penunjang keberhasilan pembangunan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2016:10); Puput Purnama Sari, Lutfi Basit (2018:56); Gerry Sambow, Anton Boham, et al (2015:11) yang menggambarkan peran kepala desa dan perangkat desa dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat agar terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Pengelolaan dana desa yang tidak tepat dapat membawa perangkat desa masuk jeruji besi. Pemerintah mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dalam penyaluran dana desa, dan masyarakat dihimbau untuk ikut mengawasi proses penyaluran dana desa, bahwa pengawasan yang baik adalah dari masyarakat.

Masyarakat dapat berperan untuk mengawasi proses penyaluran dana desa apabila pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik seperti tergambar dari penelitian Risya Umami, Idang Nurodin (2017:78), yang menyebutkan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel apabila pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya dan pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan atas

pengelolaan keuangannya baik secara moral maupun administrasi sehingga pengelolaan keuangan desa yang baik dapat terwujud .

#### **D. SIMPULAN**

Permasalahan yang selalu ditemukan terkait dengan pengelolaan dana desa adalah kurangnya Komunikasi Kepala dan Perangkat Desa dalam mensosialisasikan Dana Desa dan program-program pembangunan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa yang mempengaruhi pemahaman tentang dana desa, partisipasi masyarakat desa yang rendah dalam keterlibatan perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang menggunakan dana desa, serta kemampuan kepala desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang masih terbatas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pemberian pemahaman kepada masyarakat pemerintah nagari hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi mengenai dana desa dan program-program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat desa. Selain itu perangkat nagari hendaknya orang-orang dengan pendidikan dan kemampuan yang memadai untuk menangani permasalahan terkait dana desa, misalnya kemampuan untuk menyusun laporan dana desa atau memberikan pelayanan dan informasi yang baik kepada masyarakat. Masyarakat hendaknya peduli dengan program dana desa dan program pembangunan yang akan dilaksanakan, turut serta mengikuti musyawarah-musyawarah desa yang dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifiani, T., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(3), 317-332.
- Babeng, M. I., Moentha, A.P., & Halim, H. (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(1), 175-192.

- Bahtiar, N. A. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-14.
- Dulkiah, M., Sari, A. L., & Irwandi, I. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 7(1), 32-39.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(2), .
- Hayat & Makhmudah, M. (2016). Pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa. *Jurnal Yustista*, 5(2), 361-375.
- Hasman, R. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(11), 107-117.
- Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 52-62.
- Kartika, R. S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179-188.
- Mahmud, A. (2007). *Model Komunikasi Pembangunan Dalam Penyediaan prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Nuruzzaman, M. (2016). Pola Komunikasi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Menyusun dan Mengimplementasikan Program Pembangunan Desa. *Jurnal Logika*, 18(3), 45-53.
- Rinawati, R. (2006). Komunikasi dan Pembangunan Partisipatif. *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, 7(2), 175-184.
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 323-335.
- Sagita, N. I. (2016). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan di Kota Bandung. *CosmoGov*, 2(2), 308-329.
- Sambow, G., Boham, A., & Tangkudung, P. (2015). Peran Komunikasi Hukum Tua Dalam Menginformasikan Program Pemerintah Di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL ACTA DIURNA*, 4(5).

- Sari, P., & Basit, L. (2018). Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Interaksi*, 2(1), 47-60.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL POLITICO*, 6(1), .
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(11), 74-80.
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8-19.
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Yunus. 2016. Perencanaan Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(4), 1-15.